



PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CIPADA KECAMATAN CIKALONGWETAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Farhan Syahrul Ramadhan¹⁾

1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email : farhansyahrulramadhan7@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat yang membahas mengenai Pemilihan kepala desa yang merupakan wujud demokrasi di tingkat lokal yang memberi ruang partisipasi langsung masyarakat dalam menentukan pemimpin desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan masyarakat, panitia pemilihan, serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori demokrasi Robert Dahl. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Cipada tergolong cukup baik, terutama pada tahap pemungutan suara. Prinsip demokrasi seperti partisipasi efektif, kesetaraan hak suara, dan inklusivitas telah terlaksana, namun pemahaman politik masyarakat dan pengendalian agenda masih perlu ditingkatkan agar partisipasi tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Desa, Demokrasi Desa.

Abstract

The village head election is a form of local democratic practice that provides opportunities for community members to participate directly in selecting their village leader. This study aims to examine and analyze political participation in the village head election in Cipada Village, Cikalongwetan District, West Bandung Regency. The research employs a qualitative approach with a descriptive method, utilizing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation involving community members, election committee officials, and local community leaders. Data were analyzed qualitatively based on Robert Dahl's theory of democracy. The findings indicate that political participation in Cipada Village is relatively good, particularly during the voting stage. Democratic principles such as effective participation, equality of voting rights, and inclusiveness have been implemented; however, political awareness and agenda control among the community still need to be strengthened so that participation becomes not only procedural but also substantive. This study is

expected to contribute academically to the study of political participation at the village level and to serve as a reference for village governments and related stakeholders in improving the quality of local democracy.

Keywords: *Political Participation, Village Head Election, Village Democracy.*

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi warga negara untuk terlibat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menentukan arah kebijakan publik dan kepemimpinan politik. Di Indonesia, praktik demokrasi tidak hanya berlangsung pada tingkat nasional dan daerah, tetapi juga pada tingkat lokal melalui pemilihan kepala desa (Pilkades). Pilkades menjadi sarana penting bagi masyarakat desa untuk menyalurkan hak politiknya dalam memilih pemimpin yang dinilai mampu membawa kesejahteraan, perubahan, dan kemajuan bagi desa. Dengan demikian, Pilkades tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan, tetapi juga sebagai indikator berjalannya prinsip-prinsip demokrasi di tingkat akar rumput.

Partisipasi politik masyarakat merupakan unsur fundamental dalam demokrasi, karena mencerminkan kesadaran warga terhadap hak dan tanggung jawab politiknya. Tingginya tingkat partisipasi politik sering dikaitkan dengan kuatnya legitimasi pemerintahan yang terbentuk serta meningkatnya kualitas demokrasi. Dalam konteks Pilkades, partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keterlibatan warga dalam seluruh tahapan pemilihan, mulai dari sosialisasi, kampanye, hingga pemberian suara. Perilaku politik yang rasional, didukung oleh komunikasi dan sosialisasi politik yang efektif mengenai visi, misi, dan program kerja calon kepala desa, menjadi faktor penting dalam mendorong partisipasi politik yang berkualitas.

Secara normatif, seluruh desa di Indonesia melaksanakan Pilkades sebagai bagian dari proses rutin pergantian kepemimpinan. Kepala desa berperan sebagai pemimpin utama penyelenggara pemerintahan desa dan bertanggung jawab atas administrasi serta pembangunan desa, dengan masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya (Soemardjan, 1985). Meskipun Pilkades merupakan bentuk konkret dari demokrasi lokal, dalam praktiknya tingkat partisipasi politik masyarakat desa tidak selalu optimal. Beberapa pandangan menunjukkan bahwa

rendahnya partisipasi pemilih sering disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap calon, minimnya pemahaman politik, serta anggapan bahwa hasil Pilkades tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat (Soemardjan, 1985).

Partisipasi publik yang rendah dalam proses politik, termasuk Pilkades, telah menjadi perhatian serius dalam kajian demokrasi. Negara-negara demokratis pada umumnya meyakini bahwa semakin luas partisipasi masyarakat, semakin baik kualitas demokrasi yang terbangun, karena mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam memahami dan mengawasi proses politik (Budiardjo, 2008). Namun demikian, berbagai analisis mengenai rendahnya partisipasi politik di Indonesia sering kali masih bersifat asuntif dan belum sepenuhnya didukung oleh penelitian empiris yang mendalam, khususnya pada level pemerintahan desa.

Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika partisipasi politik yang menarik dalam pelaksanaan Pilkades. Berdasarkan data Pilkades Desa Cipada tahun 2019, tingkat partisipasi masyarakat mencapai sekitar 87,1 persen, yang tergolong sangat tinggi dibandingkan dengan rata-rata partisipasi pada pemilihan umum lainnya. Tingginya angka partisipasi ini menunjukkan adanya antusiasme masyarakat dalam menentukan pemimpin desa. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat sekitar 12,9 persen pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan tertentu dalam partisipasi politik masyarakat yang tidak dapat diabaikan, mengingat Pilkades pada umumnya memiliki tingkat partisipasi yang relatif tinggi karena kedekatan sosial antara warga dan calon kepala desa.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa tingginya tingkat partisipasi secara kuantitatif belum tentu mencerminkan kualitas partisipasi politik secara substantif. Faktor-faktor seperti dominasi tokoh lokal, politik uang, keterbatasan akses informasi, serta rendahnya pemahaman politik sebagian masyarakat berpotensi memengaruhi kualitas pilihan politik warga. Oleh karena itu, partisipasi politik masyarakat desa perlu dianalisis tidak hanya dari aspek kehadiran dalam pemungutan suara, tetapi juga dari kesadaran,

rasionalitas, dan keterlibatan warga dalam proses demokrasi secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Cipada, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi politik masyarakat Desa Cipada dalam Pilkades dengan menggunakan perspektif teori demokrasi, khususnya untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi lokal telah terimplementasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian demokrasi desa serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik dan demokrasi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam bentuk dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa di Desa Cipada, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, serta pengalaman masyarakat terkait keterlibatan mereka dalam proses demokrasi lokal.

Subjek penelitian terdiri atas masyarakat Desa Cipada yang memiliki hak pilih, panitia pemilihan kepala desa, serta tokoh masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan Pilkades. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pemilihan kepala desa. Objek penelitian difokuskan pada partisipasi politik masyarakat dalam seluruh tahapan Pilkades.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman, sikap, dan pengalaman politik masyarakat, sementara observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bentuk

partisipasi masyarakat selama proses Pilkades berlangsung. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, laporan resmi, serta data hasil pemilihan kepala desa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan mengacu pada teori demokrasi Robert A. Dahl, khususnya prinsip-prinsip partisipasi efektif, kesetaraan dalam pemberian suara, pemahaman yang memadai, pengendalian agenda, dan inklusivitas. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Cipada dalam Pemilihan Kepala Desa tergolong tinggi, dengan persentase kehadiran pemilih mencapai sekitar 87,1 persen. Angka ini mengindikasikan adanya kesadaran politik yang cukup kuat di kalangan masyarakat desa terhadap pentingnya Pilkades sebagai sarana menentukan kepemimpinan lokal. Tingginya tingkat kehadiran pemilih memperlihatkan bahwa Pilkades masih dipandang relevan dan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terlihat pada tahap pemungutan suara, tetapi juga pada keterlibatan dalam berbagai tahapan lain, seperti mengikuti sosialisasi, menghadiri kampanye calon kepala desa, serta berinteraksi secara informal dalam diskusi politik di lingkungan sosial desa. Hal ini menunjukkan bahwa Pilkades di Desa Cipada tidak semata-mata dipahami sebagai kegiatan administratif, melainkan sebagai proses sosial-politik yang melibatkan banyak aktor dan kepentingan.

Ditinjau dari perspektif teori demokrasi Robert A. Dahl, prinsip partisipasi efektif dalam Pilkades Desa Cipada relatif telah terpenuhi. Masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan pilihan politiknya secara langsung melalui pemberian suara. Prinsip kesetaraan dalam pemberian suara juga terlaksana, karena setiap warga yang memenuhi syarat memiliki hak pilih yang sama tanpa

adanya pembatasan formal berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang lainnya.

Aspek inklusivitas juga tampak dalam pelaksanaan Pilkades, di mana berbagai kelompok masyarakat termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan Perempuan dilibatkan dalam proses pemilihan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara prosedural, Pilkades di Desa Cipada telah mencerminkan nilai-nilai dasar demokrasi lokal. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa prinsip pemahaman yang memadai (*enlightened understanding*) belum sepenuhnya terwujud secara optimal. Sebagian masyarakat masih memilih berdasarkan kedekatan emosional, pengaruh tokoh lokal, atau preferensi personal, bukan atas dasar penilaian rasional terhadap visi, misi, dan program kerja calon kepala desa.

Meskipun tingkat partisipasi tergolong tinggi, kualitas partisipasi politik masyarakat Desa Cipada masih dipengaruhi oleh beberapa faktor. Politik uang, dominasi elite lokal, serta keterbatasan akses informasi menjadi variabel yang berpotensi mengurangi kualitas pilihan politik masyarakat. Dalam konteks ini, partisipasi yang tinggi secara kuantitatif belum tentu mencerminkan kedewasaan politik secara substantif.

Selain itu, terdapat sekitar 12,9 persen masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan yang dikemukakan antara lain rendahnya minat terhadap politik desa dan anggapan bahwa hasil Pilkades tidak berpengaruh langsung terhadap kehidupan mereka. Fenomena ini menunjukkan adanya gejala apatisisme politik di sebagian kecil masyarakat desa, yang apabila tidak ditangani dapat menjadi tantangan bagi keberlanjutan demokrasi lokal.

Tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Cipada memberikan legitimasi yang kuat bagi kepala desa terpilih. Legitimasi ini menjadi modal sosial dan politik yang penting dalam menjalankan pemerintahan desa, khususnya dalam melaksanakan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa yang memperoleh dukungan mayoritas warga memiliki posisi yang lebih kuat untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat.

Namun demikian, untuk memperkuat demokrasi lokal secara berkelanjutan, peningkatan partisipasi politik tidak hanya perlu difokuskan pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas. Upaya peningkatan pendidikan politik, transparansi informasi, serta penguatan ruang diskusi publik di tingkat desa menjadi penting agar masyarakat dapat berpartisipasi secara lebih sadar, rasional, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Cipada dalam pemilihan kepala desa menunjukkan keterlibatan yang relatif baik dan mencerminkan berjalannya demokrasi di tingkat lokal. Masyarakat telah berperan aktif terutama dalam penggunaan hak pilih serta keterlibatan pada berbagai tahapan pemilihan, sehingga memberikan legitimasi yang kuat terhadap kepemimpinan desa yang terpilih. Ditinjau dari perspektif teori demokrasi, prinsip-prinsip dasar seperti partisipasi efektif, kesetaraan hak politik, dan inklusivitas telah terimplementasi secara prosedural. Namun demikian, kualitas partisipasi politik masyarakat belum sepenuhnya bersifat substantif, karena masih ditemukan keterbatasan dalam pemahaman politik, kecenderungan memilih berdasarkan kedekatan personal, serta rendahnya keterlibatan sebagian warga dalam proses politik desa. Oleh karena itu, penguatan pendidikan politik, peningkatan akses informasi, dan perluasan ruang partisipasi publik menjadi langkah penting untuk mendorong partisipasi politik yang lebih sadar, rasional, dan berkelanjutan guna memperkuat kualitas demokrasi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Sage Publications.
- Huntington, S. P. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Milbrath, L. & Goel, M. L. (1977). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* Rand McNally.
- Rasyid, M. R. (2000). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Soetomo. (2012). *Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.